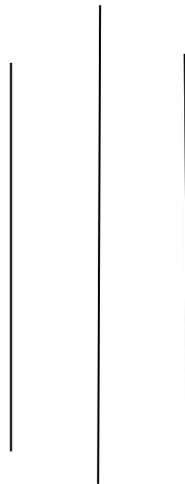




LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI
DALAM RANGKA MENINJAU PRESERVASI JALAN
DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
TANGGAL 16 MARET 2023**



**KOMISI V DPR RI
JAKARTA, 2023**

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	3
I.1. Dasar Hukum	3
I.2. Maksud dan Tujuan	3
I.3. Lokasi dan Waktu	4
I.4. Agenda Kunjungan	4
II. HASIL KUNJUNGAN DAN PERTEMUAN	4
II.1. Gambaran Umum Preservasi Jalan Di Provinsi Jawa Barat	4
II.2. Hasil Pertemuan dan Usulan	7
II.3. Kesimpulan dan Rekomendasi	8
LAMPIRAN:	9
L.1. Dokumentasi Kegiatan	9
L.2. Data Lokasi dan Anggaran	13



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI
DALAM RANGKA MENINJAU PRESERVASI JALAN
DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
TANGGAL 16 MARET 2023**

=====

I. PENDAHULUAN

I.1. DASAR HUKUM

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.
4. Hasil Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR RI tanggal 14 Maret 2023.

I.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat adalah:

- a. Untuk meninjau secara langsung pembangunan konektivitas jalan yaitu preservasi jalan di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.
- b. Untuk mengetahui dan mendengar secara langsung permasalahan serta usulan terkait pembangunan preservasi jalan di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

Tujuan dilaksanakannya kunjungan kerja adalah dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas Dewan sesuai dengan Pasal 59, ayat (4), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, yaitu:

- butir a. *melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;*
- butir d. *melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.*

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 60 ayat (3) juga menyatakan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:"

butir f *mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.*

I.3. LOKASI DAN WAKTU

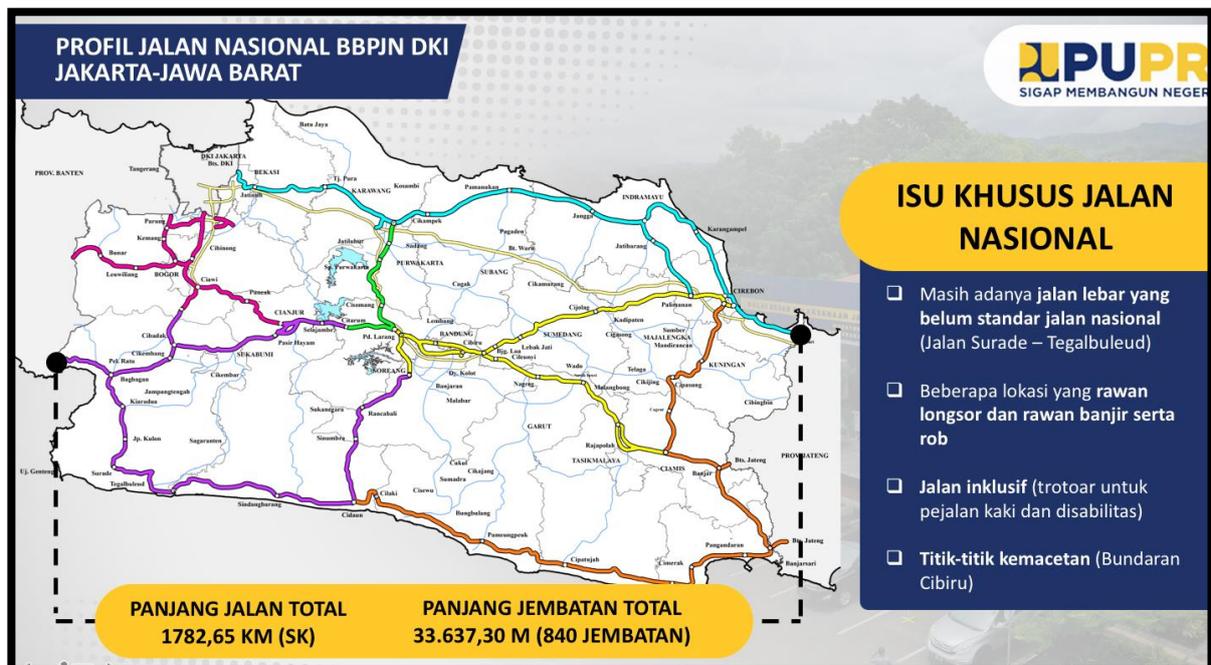
Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 tanggal 16 Maret 2023, yang dipimpin oleh **Bapak Ir. H. ANANG SUSANTO, M.Si (A-288/F-Golkar/Dapil Jabar II).**

I.4. AGENDA KUNJUNGAN

Agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yaitu peninjauan dan pertemuan Komisi V DPR RI dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBJN) Wilayah DKI Jakarta-Jawa Barat Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR.

II. HASIL KUNJUNGAN DAN PERTEMUAN

II.1. GAMBARAN UMUM PRESERVASI JALAN DI PROVINSI JAWA BARAT

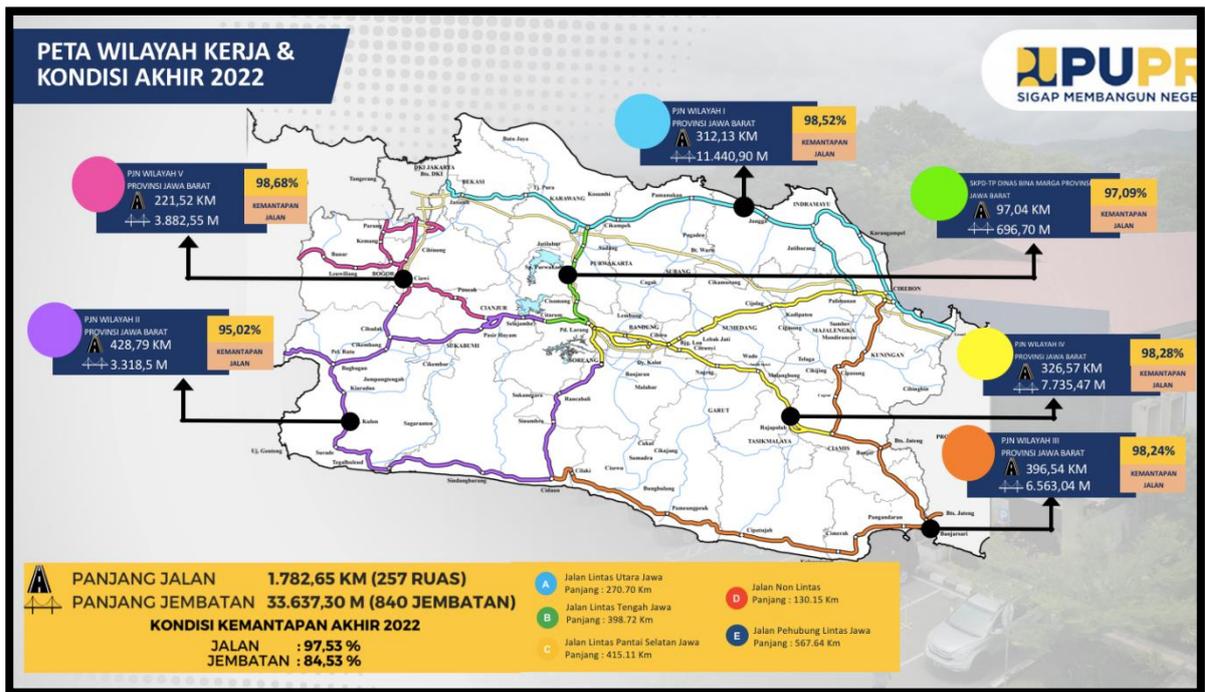


- Berdasarkan Undang-Undang (UU) no. 2 tahun 2022 tentang Jalan bahwa infrastruktur Jalan sebagai salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum dan sebagai prasarana dasar dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai konektivitas antar pusat kegiatan, keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, peningkatan perekonomian pusat dan daerah dalam kesatuan ekonomi nasional sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan dan membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila;
- Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
- Preservasi adalah perawatan yang bersifat preventif untuk mempertahankan kondisi kemantapan Jalan hingga mencapai umur rencana;
- Preservasi Jalan meliputi kegiatan: pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, rekonstruksi, pelebaran menuju standar dan diatur dengan peraturan pemerintah;
- Kegiatan Pemeliharaan, Rehabilitasi, Rekonstruksi, dan Pelebaran Jalan menuju standar, yang berkelanjutan untuk mempertahankan jalan dalam kondisi mantap (SSKK SBD Kontrak Preservasi Jalan dengan Skema Long Segment sesuai SE Dirjen Bina Marga No.01/SE/Db/2019);
- Program preservasi jalan didasarkan dan memperhatikan perundangan yang berlaku: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
- Pembangunan preservasi jalan Soreang, Rancabali (Kabupaten Bandung dan Cidaun (Kabupaten Cianjur) Jawa Barat menggunakan dana APBN. Ruas jalan ini telah beralih status dari jalan provinsi berubah menjadi jalan nasional;

- Alokasi APBN Preservasi jalan di Provinsi Jawa Barat:

TAHUN	2022	2023
ANGGARAN	277,5 M	380,1 M
PANJANG JALAN	194 km	433 km

- Berdasarkan penilaian BBJN Wilayah DKI Jakarta-Jawa Barat KemenPUPR beberapa ruas jalan ini (Soreang-Rancabali-Cidaun) belum standar dari sisi lebar jalan maupun dari sisi tikungannya, beberapat *spot* akan dilebarkan dan beberapa tikungan (geometrik) akan diperbaiki agar lebih aman dan nyaman;
- Menurut BBJN Wilayah DKI Jakarta-Jawa Barat KemenPUPR dengan perbaikan ruas jalan ini (Soreang-Rancabali-Cidaun) yang panjangnya 80 Km, yang awalnya jarak tempuh memakan waktu 4 jam dengan perkiraan kecepatan kendaraan 20-25 Km/jam akan menjadi 2 jam dengan perkiraan kecepatan kendaraan 40 Km/jam dengan memperbaiki jalan dan tikungannya (geometri).



II.2. HASIL PERTEMUAN DAN USULAN

Beberapa topik dan usulan yang menjadi perhatian pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, antara lain:

1. Perlu dukungan seluruh pihak agar preservasi jalan nasional ruas Soreang-Rancabali-Cidaun dan ruas Nagreg di Kabupaten Bandung dapat dilaksanakan di tahun mendatang;
2. Preservasi jalan di Kabupaten Bandung membutuhkan kordinasi lintas kementerian yang akan dibantu oleh pemerintah kabupaten Bandung sehingga pekerjaan preservasi jalan bisa lebih cepat dikerjakan dan diselesaikan;
3. Meminta BBJN Wilayah DKI Jakarta-Jawa Barat KemenPUPR agar penyelesaian preservasi jalan diutamakan ke ruas-ruas jalan yang mengalami kemacetan;
4. Beberapa ruas jalan yang akan dipreservasi merupakan masih dikuasai masyarakat dan kawasan hutan lindung yang perizinannya membutuhkan waktu;
5. Kami mendukung adanya perubahan/pengalihan titik lokasi ruas preservasi jalan ke lokasi yang tanahnya telah dibebaskan serta siap dikerjakan dan diselesaikan dalam waktu singkat;
6. Kami meminta kepada KemenPUPR agar pelebaran jalan di wilayah Kabupaten Bandung melakukan langkah-langkah strategis dan persuasif pada pembebasan lahan masyarakat, BUMN dan kawasan hutan lindung.

Usulan Bupati Kabupaten Bandung:

1. Program pelebaran jalan di Kabupaten Bandung sekiranya mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung dan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Perlunya pelebaran ruas jalan paciran, pasir jambu, ciwidey, dan rancabali untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan dapat lebih berkembang. Beberapa ruas jalan ini yang akan dilebarkan merupakan milik BUMN PTPN dan PERHUTANI yang perizinannya akan dibantu oleh Pemda Kabupaten Bandung;
3. Kami berharap beberapa usulan Kabupaten Bandung terkait pembangunan jalan segera dapat direalisasikan oleh pihak KemenPUPR karena tanahnya telah dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Bandung.

II.3. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Komisi V DPR RI mendukung penuh pembangunan preservasi jalan di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR untuk memfokuskan kegiatan preservasi jalan di beberapa lokasi strategis di Kabupaten Bandung;
3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR untuk menyelesaikan pembangunan preservasi jalan di Kabupaten Bandung untuk melancarkan lalu lintas menjelang mudik dan arus balik hari raya Idul Fitri tahun 2023;
4. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR agar segera berkordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bandung terkait beberapa usulan preservasi dan pembangunan jalan dari pemerintah Kabupaten Bandung.

III. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023. Laporan ini menjadi masukan bagi Komisi V DPR RI dan dapat ditindaklanjuti Pemerintah dalam perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat, khususnya mempercepat rencana pembangunan preservasi jalan di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, yang pada akhirnya akan menggerakkan sektor ekonomi, pangan dan sektor lainnya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

KETUA TIM

ttd

Ir. H. ANANG SUSANTO M.SI
A-288

LAMPIRAN:

L.1. DOKUMENTASI KEGIATAN

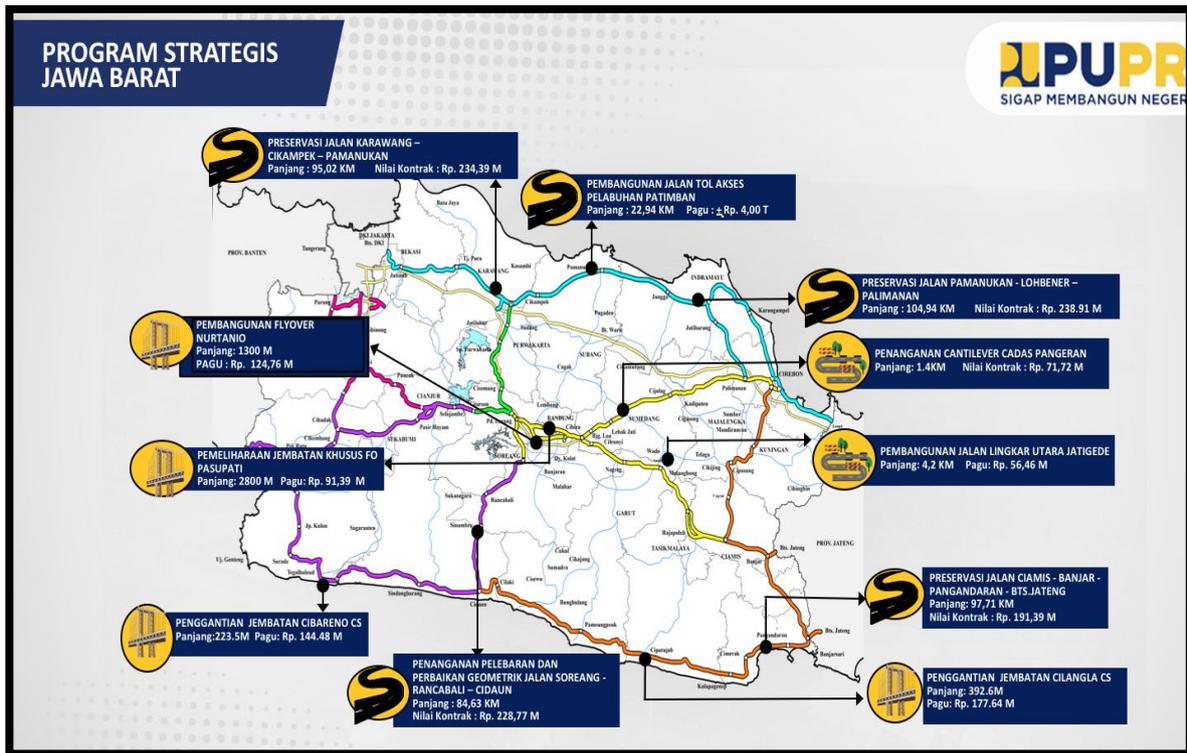








L.2. DATA LOKASI DAN ANGGARAN



**POSTUR ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**TOTAL
Rp 3.076,47 Milyar**

**RUPIAH MURNI
Rp. 1521,75 M**

**SBSN
Rp. 405,73 M**

**PHLN
Rp. 1.149,00 M**

PEMBANGUNAN JALAN
Rp 53,04 M
Pembangunan Jalan 0,08 km

PEMBANGUNAN JALAN BEBAS HAMBATAN
Rp 1.099,77 M
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan 0,50 km

DUKUNGAN MANAJEMEN
Rp 123,52 M
Belanja Pegawai, Belanja Operasional Perkantoran dan Non Operasional Mendukung Kegiatan Rutin Perkantoran

DUPLIKASI/PEMBANGUNAN JEMBATAN / FO / UNDERPASS
Rp 348,36 M
• Pembangunan Jembatan (termasuk Jembatan Gantung) 614,00 m
• Pembangunan FO / Underpass 520,00 m
• Penggantian / Duplikasi Jembatan 219,33 m

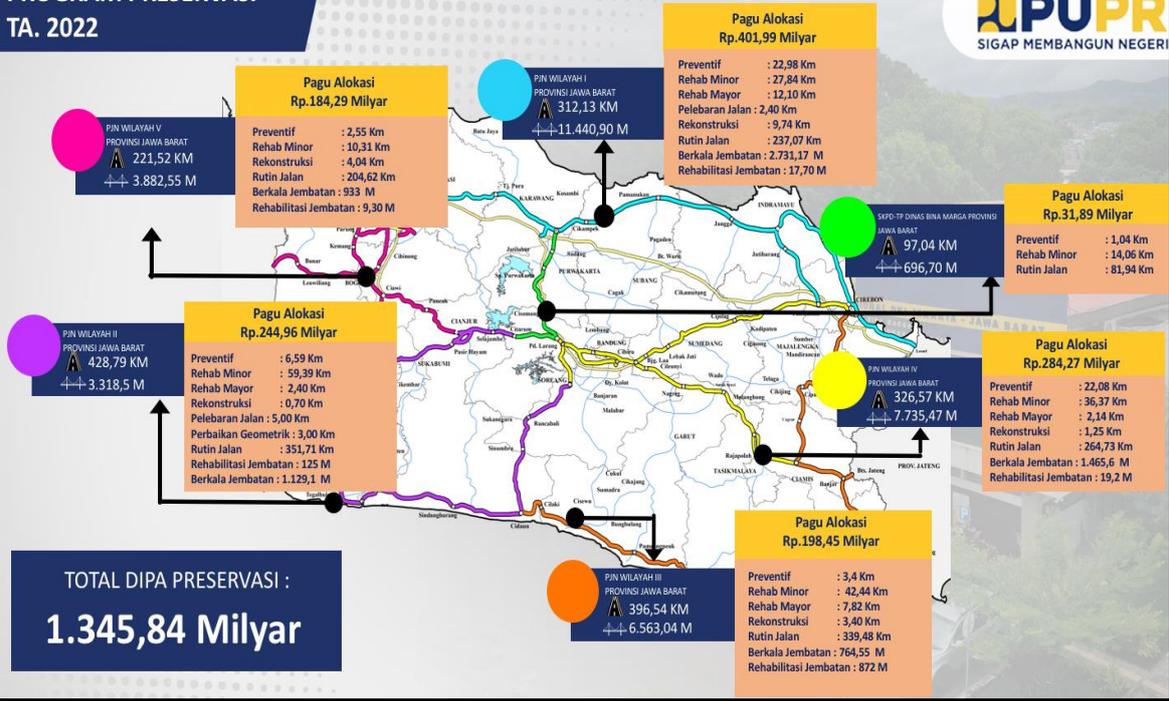
PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN
Rp 852,69 M
• Preservasi Jalan 294,17 km
• Perbaikan Geometrik 3,00 km
• Pelebaran Jalan Menuju Standar 7,40 km
• Preservasi Jembatan 8.260,37 m

DUKUNGAN TEKNIKIS
Rp 105,92 M
Pengendalian, Perencanaan Teknis dan Pengawasan Teknis

OFF - PAVEMENT
Rp 277,87 M
• Penanganan Drainase 90,33 km
• Trotoar dan Bahu Jalan 9,20 km
• Penanganan Longsor 1.548,40 m

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN
Rp 215,28 M
• Rutin Jalan 1.482,96 km
• Rutin Jembatan 23.989,65 m
• Rutin Jalan Baru 17,10 km

**PROGRAM PRESERVASI
TA. 2022**



POSTUR ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023



TOTAL
Rp 1.647,34 M

RUPIAH MURNI
Rp. 997.331 M

SBSN
Rp. 649.817 M

PHLN
Rp. 0.2 M

PEMBANGUNAN JALAN
Rp 183,58 M
Pembangunan Jalan 0,41 Km

PEMBANGUNAN JALAN BEBAS HAMBATAN
Rp 0,05 M
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan 0,40 Km

DUKUNGAN MANAJEMEN
Rp 74,65M
Belanja Pegawai, Belanja Operasional
Perkantoran dan Non Operasional
Mendukung Kegiatan Rutin Perkantoran

DUPLIKASI/PEMBANGUNAN JEMBATAN / FO / UNDERPASS
Rp 283,76 M
• Pembangunan Jembatan 320,01 m
• Penggantian Jembatan 2243,22 m

PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN
Rp 635,54 M
• Preservasi Jalan 46,65 Km
• Perbaikan Geometri dan Perlengkapan Jalan 0,03 km
• Preservasi Jembatan 4.468,05 M

DUKUNGAN TEKNIS
Rp 150,42 M
Pengendalian, Perencanaan Teknis dan Pengawasan Teknis

OFF - PAVEMENT
Rp 133,79 M
• Penanganan Drainase 27,43 Km
• Trotoar dan Bahu Jalan 7,31 Km
• Penanganan Longsor 82,92 Km
• Penanganan Fasilitas Keselamatan Jalan 2,05 Km
• Penanganan Blackspot 2,94 Km

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN
Rp 185,55 M
• Rutin Jalan 1.740,87 Km
• Rutin Jembatan 7.914,5 M
• Pemeliharaan Rutin Jalan Baru 24,80 M (Lingkar Timur Kuningan dan Jatigede)

PROGRAM PRESERVASI SATUAN KERJA

